

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KECAMATAN TABUKAN UTARA KAB. KEPULAUAN SANGIHE

Joanne V. Mangindaan¹, Hendrik Manossoh²

joanne_valesca@yahoo.com
hendrikmanossoh@gmail.com

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

ABSTRACT

Village fund, which is allocated from the Indonesia Budget, is a form of central government's recognition to the village government. This fund is expected to support the livelihood of the rural communities. The authority of the village government to manage such a great amount of fund independently comes with heavy responsibility. This requires high quality of human resources, so the village government can manage the fund based on good government governance principles.

This study is aimed to analyze the quality of the human resources of the government of Tabukan Utara sub-district at Sangihe Regency. This study utilizes qualitative methodology and uses interview and documentation as the data collection method. To measure the quality of human resources, this study occupies indicators from the multilevel model of human capital emergence from Ployhart dan Moliterno (2011), i.e. knowledge, skills, abilities dan experience. The finding of this study shows that based on the four indicators the quality of human rescources of the village government of Tabukan Utara remains not sufficient to manage the village fund. There should be some efforts by the local and central government to improve the quality of human resources of the village government.

Keywords: *Village fund, human resources quality*

PENDAHULUAN

Dalam aspek otonomi keuangan, sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa memiliki tujuh sumber pendapatan, dimana yang terbesar jumlahnya adalah yang bersumber dari APBN (Kompas, 2015). Sumber pendapatan desa dari APBN tersebut meliputi meliputi: 1) dana desa (DD) dan 2) alokasi dana desa (ADD). Dana desa yang

bersumber dari APBN ini diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan.

Jumlah dana desa yang dialokasikan dan dikucurkan oleh pemerintah yang dimulai dari tahun 2015 sangatlah besar dimana untuk tahun 2017 ini, pemerintah mengucurkan DD Rp.60 triliun (DJKP, 2015). Selanjutnya, besaran ADD untuk tahun yang sama yang tercantum dalam dokumen kebijakan dana desa DJKP 2017 adalah sebesar Rp.42,285 triliun. Di Sulawesi Utara sendiri, total DD dan ADD yang dianggarkan pada tahun 2016, bagi keseluruhan 1505 desa adalah sebesar kurang lebih Rp.911,498 miliar untuk DD dan Rp.577,610 miliar untuk ADD dan untuk tahun 2017 sendiri, total anggaran DD yang akan disuntikan sebesar Rp.1,161 triliun (DJKP, 2017).

Kenaikan anggaran dana desa, baik DD dan ADD, merupakan hal yang wajib mengingat pertumbuhan dan kebutuhan desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Dana desa merupakan wujud rekognisi negara terhadap desa. Akan tetapi, kewenangan yang diterima oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa dari pemerintah pusat ini belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai (BPKP, 2015). Keterbatasan SDM pemerintah desa menjadi penghambat penyaluran dana desa di sejumlah daerah. Menjelang akhir tahun 2016 penyerapan dana desa baru mencapai 80%, yang sebenarnya bila dapat dimanfaatkan secara optimal akan berpengaruh banyak pada pemberdayaan masyarakat desa (Sanusi, 2016).

Di Sulawesi Utara sendiri, persoalan mengenai kualitas SDM pengelola dana desa juga mengakibatkan penyerapan dana desa dari APBN masih belum maksimal, Dana desa pada tahun 2015 terlambat dicairkan karena ketidaksiapan desa dalam mengelola dana desa tersebut (Jafar, 2015). Tuerah (2015) mengemukakan bahwa rendahnya penyaluran dana desa di Sulut karena belum lengkapnya persyaratan administrasi berupa dokumen yang diminta untuk penyaluran dana tersebut. Perangkat desa belum belum berpengalaman dalam melengkapi syarat yang diperlukan (Tuerah, 2015). Mokoginta (2015) juga menyatakan keterbatasan sejumlah aparatur dan kualitas SDM di desa yang rendah juga menjadi penghambat penyerapan dana desa.

Dengan demikian, kualitas SDM sangatlah penting untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Berbagai penelitian yang mengkaji implementasi pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada ininya terletak pada sumber daya aparatur desa yang menjadi pengelola anggaran tidak disiapkan dengan matang (Sanusi, Paranoan dan

Djumalani, 2014; Pratiwi dan Roekhudin, 2016; Putra, Pratiwi dan Suwondo, 2013; Subroto, 2009). Oleh karena itu, peneliti merasa kajian mengenai kualitas SDM pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN sangatlah penting untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini, dana desa yang bersumber dari APBN mencakup DD dan ADD. Peneliti memilih Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe sebagai objek penelitian, karena adanya fakta bahwa hingga awal triwulan keempat pada tahun 2015, masih ada 10 desa yang belum mencairkan ADD tahap 1 karena pihak desa belum memasukkan usulan beserta persyaratannya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Hapendatu, 2015). Selanjutnya, pada tahun 2016 serapan dana desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tergolong lamban, dimana hingga bulan Oktober kurang dari 10% total desa yang mendapat dana desa, yakni 8 dari 145 desa di Sangihe yang belum mencairkan akibat ketidaksiapan desa tersebut dalam melengkapi dokumen yang disyaratkan (Hapendatu, 2016).

Mengacu pada uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana kualitas SDM pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe?” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas SDM Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan indikator *knowledge, skills, abilities dan experience* dalam multilevel model of human capital emergence dari Ployhart dan Moliterno (2011).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Dana Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa yang bersumber dari APBN mencakup DD dan ADD. DD merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, sedangkan ADD merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yakni 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana desa yang bersumber dari APBN ini

diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk “mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera” (BPKP, 2015). Srirejeki (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan dan kekayaan desa secara mandiri yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 memang menjadikan desa sebagai subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan, namun di lain pihak memberikan beban tanggung jawab yang besar bagi pemerintah desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik, jujur, dan tidak melakukan penyelewengan.

Multilevel Model of Human Capital Resource Emergence

Multilevel model of human capital resource emergence adalah model yang diajukan oleh Ployhart dan Moliterno (2011) yang mendefinisikan human capital sebagai sumber daya dalam tataran organisasi yang dihasilkan melalui *knowledge, skills, abilities* dan *experience* dari individu – individu yang berbeda dalam organisasi tersebut. Dalam penelitian mereka, Ployhart dan Moliterno (2011) menjawab pertanyaan bagaimana individu yang dengan *knowledge, skills, abilities* dan *experience* yang berbeda dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi organisasi. Model yang dihasilkan dalam penelitian ini selanjutnya menjelaskan bahwa masing-masing individu memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam hal *knowledge, skills, abilities* dan *experience* dan human capital merupakan sumber daya yang sangat berkaitan dengan kinerja suatu organisasi.

Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini, sepanjang pengetahuan peneliti, kajian yang secara khusus memfokuskan pada kualitas SDM pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN belum pernah dilakukan. Penelitian yang berkaitan pengelolaan dana desa kebanyakan mengkaji dari aspek implementasi dengan membandingkan kesesuaian aturan pengelolaan dana desa dengan yang implementasi sesungguhnya di lapangan.

Seperti pada penelitian Pratiwi dan Roekhudin (2016) di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, peneliti mengkaji kesesuaian antara implementasi pengelolaan keuangan DD yang telah diselenggarakan dengan peraturan yang mendasarinya. Studi dari Sanusi, Paranoan dan Djumlani (2014) juga menganalisis implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Putra, Pratiwi dan Suwondo (2013) menganalisis proses pengelolaan ADD di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, sedangkan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat merupakan faktor penghambat.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD menjadi fokus dalam penelitian Subroto (2009). Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, sebagai lokasi pelaksanaan ADD. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam pertanggungjawaban berdasarkan hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Subroto (2009) pada akhirnya berkesimpulan bahwa kendala utama ketidaksesuaian dengan ketentuan dari sisi administrasi adalah akibat belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian Ompi (2013) merupakan salah satu penelitian dana desa dengan objek penelitian di desa di Sulawesi Utara, yaitu di Desa Pangu Kabupaten Minahasa

Tenggara. Kesimpulan dari penelitiannya adalah terdapat faktor Disposisi, faktor komunikasi, faktor struktur birokrasi dan faktor sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dari beberapa informan. Para informan adalah Kepala Desa dan aparatur desa serta pendamping. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang relevan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 10 (sepuluh) informan, yang adalah pemerintah desa dan pendamping di Kecamatan Tabukan Utara. Dokumen dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa seperti APBDes, RPJMD serta RKP Desa.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana dikembangkan Miles dan Huberman (1984), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mengacu pada teknis analisis data Miles dan Huberman, dalam penelitian ini pada saat pengumpulan data, proses analisis data sudah dimulai. Jadi hal ini pada saat mengumpulkan data lewat wawancara dengan informan dan/atau dokumentasi, peneliti sudah menganalisis data-data yang relevan dengan penelitian.

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah dengan melakukan reduksi data. Dalam hal ini data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dipilah-pilah pada hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sesuai dengan indikator kualitas SDM pemerintah desa. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah dengan mendisplaykan data. Data display yang digunakan adalah dalam bentuk naratif dan table/gambar sesuai dengan data yang diperoleh. Tahapan terakhir dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahapan ini, berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat

pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal, yaitu mengenai kualitas SDM pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Pengujian Keabsahan Data

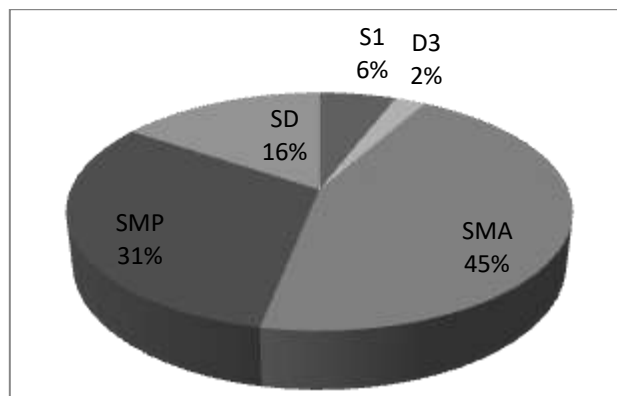
Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknnik triangulasi. Adapaun teknik triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan pandangan dan perspektif informan yang satu dengan yang lain. Dalam hal triangulasi metode, penelitian ini melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis *Knowledge* Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara

Ployhart dan Moliterno (2011) mendefinisikan *knowledge* sebagai pemahaman akan data – data, proses dan fakta yang didapat lewat tingkat edukasi formal. Oleh karena itu dalam menganalisis kualitas SDM Pemerintah Desa untuk indikator *knowledge* pada penelitian ini dilihat dari tingkat pendidikan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara.

Dari dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti, tingkat pendidikan Pemerintah Desa, mulai dari Kepala Desa (Kapitaraung), Sekretaris Desa dan jajarannya, masih belum memadai. Gambar 1 mengilustrasikan persentase tingkat pendidikan formal keseluruhan Perangkat Desa di 24 desa yang berada di Kecamatan Tabukan Utara.



Gambar 1 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Kecamatan Tabukan Utara
(sumber: data diolah)

Dari gambar tersebut, mayoritas Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Tabukan Utara berpendidikan SMA, yaitu sekitar 45%, diikuti oleh lulusan SMP sebesar 31% dan hanya 6% dan 2% dari keseluruhan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara yang sempat mengancam pendidikan setingkat Sarjana dan Diploma.

Jika dilihat dari jumlahnya, dari total 256 perangkat desa pada keseluruhan 24 desa di Kecamatan Tabukan Utara masih terdapat 40 orang lulusan Sekolah Dasar dan hanya sebanyak 15 orang yang sempat mengenyam pendidikan Sarjana dan 6 orang berpendidikan D-3. Di beberapa desa, masih terdapat bendahara desa yang tingkat pendidikannya lulusan SD.

Ini memperlihatkan di Kecamatan Tabukan Utara belum tersedia SDM yang memadai dari sisi *knowledge* sehingga mempengaruhi kinerja mereka dalam mengelola dana desa yang sesuai dengan prinsip – prinsip *good governance*. Data dari dokumen ini, diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan – informan sebagai berikut:

“Masi ada SD,SMP,SMA. Jadi rata-rata SMP kalu torang 13 SD, SMP, SMA. Ada 3 yang iko persamaan ke SMA.”

(Wawancara dengan Informan 2)

“Iya, karna di Naha Induk depe bendahara cuma SMP kong memang nintau sama sekali le. Dorang-dorang no jaga stir dorang”

(Wawancara dengan Informan 3)

“Io tetap ada buku kas nah siap bertugas mencatat transaksi biasanya bendahara. Yang seharusnya mencatat bendahara noh tapi dalam kenyataannya nda bisa. Kenyataannya sama dengan tadi dia tamatan, tamatan SMP.”

(Wawancara dengan Informan 10)

“Hampir semua bendahara kampung rata-rata begitu. Cuma lulusan SMA deng SMP. Ada tre yang lulusan SD. Jadi memang kalo dia lulusan SMEA kwa paling kurang jurusan akutansi bagus.”

(Wawancara dengan Informan 2)

Analisis Skills Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara

Skills adalah kemampuan untuk mempelajari informasi tambahan yang didapat lewat pelatihan – pelatihan (Ployhart dan Moliterno, 2011). Dengan demikian, indikator *skills* ini dianalisis lewat apakah aparat Pemerintah Desa telah mengikuti pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa pengelola dana desa masih belum memadai. Memang beberapa dari perangkat desa di Kecamatan Utara telah mengikuti pelatihan di Jakarta. Akan tetapi, bentuk pelatihan yang diberikan tidak cukup untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa, karena materi yang diberikan hanyalah mengenai aturan saja, tanpa ada penjelasan lebih mendalam kepada para perangkat desa tersebut. Ada juga yang mengikuti bimbingan teknis, tapi bukan mengenai pengelolaan keuangan. Ada pula perangkat desa yang belum mengikuti pelatihan karena baru menjadi perangkat desa. Berikut ini petikan wawancara dengan beberapa informan:

“Iko pelatihan tapi depe pelatihan nyanda pas, karena disana itu cuma sekedar sosialisasi regulasi bukan depe teknik yang diajar... jadi itu e masalah pelatihan tadi nyanda efektif. Nyanda efektif karena yang diajarkan cuma regulasi, coba regulasi itu cuma di print terus dibikin bahan bacaan sama kapitalaung atau dikamar bisa baca. Emang ada orang yang membaca dicerna-dicerna ada yang nyanda katu, okeylah tapikan bukan sekedar itukan... setelah di tanya apa yang didapat di pelatihan, Nyanda dapa apa apa, cuma baca-baca tu peraturan”

(Wawancara dengan Informan 5)

“Mar kita baru baru iko Bimtek, mar Bimtek penyusunan proposal dari kementerian pemuda olahraga. Bukan bimtek dana desa”

(Wawancara dengan Informan 2)

“Belum pernah ikut pelatihan selama ini. Soalnya baru lei jadi bendahara. nanti mo iko tahun ini”

(Wawancara dengan Informan 4)

“Jadi sekretaris nda pernah ikut pelatihan. Bendahara lei belum pernah, baru kwa dia. Jadi nda pernah ikut pelatihan dia”

(Wawancara dengan Informan 1)

Analisis *Experience* Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara

Menurut Ployhart dan Moliterno (2011), *experience* merefleksikan kemampuan mentransfer pengetahuan yang didapat dari luar ke tempat individu tersebut bekerja dan dapat bervariasi sesuai dengan jumlah, waktu dan tipe pekerjaan yang ditekuni. Dengan

demikian *experience* ini diukur dengan pengalaman kerja Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan sebelum menjadi perangkat desa.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa mayoritas Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. Beberapa perangkat desa sebelumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani dan tidak memiliki pengalaman apapun dalam bidang keuangan. Ada bendahara desa yang terpilih bukan karena pengalaman sebelumnya, akan tetapi berdasarkan kedekatan dengan Kepala Desa. Ada juga yang baru – baru ini diangkat menjadi PNS. Selanjutnya, pendamping desa yang seharusnya mengayomi dan membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa juga kurang memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang keuangan. Demikian petikan wawancara dengan para informan:

“Dulu kerja di talaud di BKKBN, Badan Keluarga Berencana. Mar bukan di bidang keuangan... Baru skarang mangada tu begini

(Wawancara dengan Informan 9)

Bendahara...memang nintau sama sekali le. Dorang-dorang no jaga stir. Dorang situ semua dorang keluarga. Keluarga dari pa dia (Kepala Desa) no orang-orang dalam, oh tu anu itu bendahara dekat deng dia (Kepala Desa).

(Wawancara dengan Informan 3)

Jadi dia baru bahkan ada yang baru iko PNS to sekretaris desa di sini...memang dorang masih muda”

(Wawancara dengan Informan 2)

“Pendampingan ada tetap tapi nyanda juga. Jadi belum juga sesuai yang diharapkan. E, kadang kadang torang batanya masih juga belum paham ini dia. Sebenarnya mengayomi tapi kenyataannya dorang jaga batanya”

(Wawancara dengan Informan 4)

Analisis *Abilities* Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara

Abilities sebagai kemampuan komprehensif, dimana individu yang memiliki tingkat *abilities* yang lebih tinggi akan mempelajari sesuatu lebih cepat, mendapat benefit yang lebih dari pengalaman dan mendapatkan pengetahuan lebih dalam (Ployhart dan Moliterno, 2011; Jensen, 1998). *Abilities* juga dinyatakan sebagai predictor paling kuat keberhasilan seseorang dalam pendidikan, kinerja pekerjaan, tingkat promosi, dan

jumlah gaji (Carroll, 1993; Gottfredson, 1997; Jensen, 1998; Schmidt & Hunter, 1998). Dibandingkan dengan ketiga indikator kualitas SDM sebelumnya (*knowledge, skills, dan experience*), indikator *Abilities* merupakan kemampuan yang stabil dan tidak akan dipengaruhi oleh tambahan pendidikan maupun pengalaman (Ployhart dan Moliterno, 2011). Oleh karena itu, indikator *abilities* diukur dari kemampuan komprehensif Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa. Selain itu, prestasi yang dicapai perangkat desa pada saat sekolah dan kinerja perangkat desa dalam pekerjaan mereka juga digunakan untuk mengukur indikator *abilities*. Karena cakupan *abilities* lebih komprehensif dibandingkan dengan ketiga indikator sebelumnya, untuk indikator *abilities* peneliti juga menggunakan *personal judgement* untuk menilai para informan dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan pada saat wawancara mengenai pengelolaan dana desa.

Dari hasil wawancara dengan informan terlihat bahwa tingkat *abilities* dari Pemerintah Desa dan pendamping dalam mengelola dana desa masih belum memadai. Ini diindikasikan oleh ketidak-pahaman atas aturan/regulasi mengenai pengelolaan dana desa walaupun perangkat desa tersebut sudah mengikuti pelatihan. Beberapa Kepala Desa, walaupun memiliki tingkat pendidikan sarjana, akan tetapi tidak mengetahui mengenai prosedur pembuatan laporan keuangan. Ada juga bendahara desa yang tidak mengerti mengenai pembukuan. Selain itu, tingkat *abilities* yang tidak memadai juga diindikasikan dengan kinerja perangkat desa yang tidak baik dalam mengelola dana desa dan juga tidak memiliki prestasi yang baik pada saat bersekolah. Berikut ini hasil wawancara dengan para informan

“Yah, sedangkan kepala desa nda tau mo beking laporan keuangan. Nyanda samua tau, biar lei sarjana.”

(Wawancara dengan Informan 8)

“Ini noh bendahara kampung nda memahami mengenai pembukuan. Kong di skolah dulu lei nda juara. Kalo juara minimal depe anlisis boleh jadi mampu”

(Wawancara dengan Informan 6)

“Memang dorang so pi bimtek. Mar tetap nda tau. Apa itu karna depe Bimtek nda talalu jelas ato stou memang dorang yang susah mangarti. Yah bagitu no kasiang. Memang belum mampu itu SDM”

(Wawancara dengan Informan 7)

Pembahasan

Dari hasil analisis empat indikator kualitas SDM, yakni *knowledge*, *skills*, *experience* dan *abilities*, yang diuraikan di atas, terlihat bahwa secara umum kualitas SDM Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa di Kecamatan Tabukan Utara belumlah memadai. Tingkat pendidikan Pemerintah Desa di 24 desa di Kecamatan Tabukan Utara, didominasi oleh lulusan SMA dan SMP, bahkan masih banyak aparat desa, khususnya bendahara yang hanya lulusan SD. Sedangkan dari indikator *skills*, ditemukan bahwa masih banyak aparatur desa yang belum mengikuti pelatihan. Kalaupun ada beberapa yang sudah mengikuti pelatihan, pelatihan tersebut dirasakan tidak membawa dampak untuk peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan dana desa. Untuk indikator *experience*, hasil analisis yang diuraikan di atas juga memperlihatkan bahwa, mayoritas aparat desa tidak mempunyai *experience* yang cukup untuk mengelola dana desa. Di semua 24 desa yang berada di Kecamatan Tabukan Utara, tidak ada aparat desa yang memiliki latar belakang di bidang keuangan. Selain itu, pendamping yang seharusnya memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa tidak memiliki pengalaman yang sesuai. Sama halnya dengan *knowledge*, *skills*, dan *experience*, kualitas SDM Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara berdasarkan hasil analisis indikator *abilities* juga belum terlalu memadai. Kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa masih sangat terbatas dalam baik dalam pemahaman mengenai aturan/regulasi dan pembuatan laporan keuangan maupun pengelolaan dana desa secara umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, kualitas SDM Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN di Kecamatan Tabukan Utara belum terlalu memadai. SDM Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara belum terlalu siap dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN.
2. Berdasarkan indikator *knowledge*, tingkat pendidikan aparat pemerintah desa adalah mayoritas lulusan SMA dan SMP, bahkan masih banyak yang hanya lulusan SD.

3. Berdasarkan indikator *skills*, masih banyak aparat Pemerintah Desa belum mengikuti pelatihan. Meskipun ada beberapa yang telah mengikuti pelatihan, materi pelatihan tidaklah efektif dalam meningkatkan SDM Pemerintah Desa untuk mengelola dana desa.
4. Berdasarkan indikator *experience*, rata – rata aparat Pemerintah Desa tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. Ada bendahara yang tidak dipilih berdasarkan *experience*, akan tetapi berdasarkan kedekatan dengan Kepala Desa. Pendamping desa yang seharusnya bertugas untuk memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Desa, juga tidak sesuai dengan yang diharapkan
5. Berdasarkan indikator *abilities*, kemampuan komprehensif dalam pengelolaan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara masih sangat terbatas.

Dari kesimpulan di atas, berikut ini rekomendasi/saran yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara:

1. Untuk meningkatkan *knowledge*, perlu ada revisi aturan mengenai tingkat pendidikan minimal aparat Pemerintah Desa. Aturan yang berlaku saat ini, masih membolehkan lulusan SMP untuk menjabat sebagai Kepala Desa. Oleh karena itu, syarat tingkat pendidikan bagi Kepala Desa perlu ditingkatkan menjadi minimal lulusan SMA. Untuk bendahara, tingkat pendidikan minimal juga harus SMA/SMK sederajat.
2. Untuk meningkatkan *skills*, seluruh aparat Pemerintah Desa perlu untuk mengikuti pelatihan terkait dengan pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat juga perlu memperbaiki metode pelatihan yang diberikan agar lebih efektif dan diterima dengan baik oleh aparat Pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan tersebut.
3. Untuk meningkatkan *experience*, siapa pun yang akan masuk sebagai jajaran Pemerintah Desa haruslah mengadopsi prinsip '*the right man on the right job*'. Kepala desa perlu untuk memilih bendahara desa yang punya pengalaman di bidang pengelolaan keuangan, bukan karena kedekatan dengan Kepala Desa. Pendamping desa yang turun untuk mendampingi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa, perlu dievaluasi dan dipilih orang yang memiliki

experience yang sesuai sehingga pendamping ini dapat melakukan tugasnya dengan baik.

4. Untuk meningkatkan *abilities*, perlu adanya perbaikan kualitas SDM secara komprehensif di desa. Kenyataan yang ada, masyarakat desa seringkali termarginalkan dan terdapat gap yang cukup besar dengan masyarakat yang hidup di kota. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa, termasuk peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah badan pengawasan keuangan dan pembangunan
- DJPk, 2015. Kebijakan Dana Desa Tahun 2015, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, diakses dari http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD-2016_Kemenkeu.pdf
- DJPk, 2017. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf>
- Hapendatu, A., 2015. 10 Kampung di Sangihe Belum Cair ADD Tahap 1, Suara Sulut 1 Oktober, diakses dari <http://suarasulutnews.co.id/2015/10/10-kampung-di-sangihe-belum-cair-add-tahap-1/>
- Hapendatu, A., 2016. Masih Ada ADD Kampung Tahap Pertama Belum Cair, Suara Sulut 15 Oktober, diakses dari <http://suarasulutnews.co.id/2016/10/masih-ada-add-kampung-tahap-pertama-belum-cair/>
- Jafar, M., 2015. Menteri DPDTT: 1.514 Desa Belum Siap Dana Desa Sulut Batal Cair, Manado Pos 30 April, diakses dari <http://manadopostonline.com/read/2015/04/30/Dana-Desa-Sulut-Batal-Cair/8916>
- Kompas, 2015. Dana Besar Akan Banjiri Desa, 27 Februari, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/27/15050061/Dana.Besar.Akan.Banjiri.Des>
- Mokoginta, R., 2015, Dana Desa Sulut Akhirnya Segera Dicairkan, Sulut Today 6 Mei, diakses dari <http://www.suluttoday.com/2015/05/06/dana-desa-sulut-akhirnya-segera-dicairkan/>
- Ployhart, R. E. dan Moliterno, T. P, 2011. Emergence of the Human Capital Resource: A Multilevel Model, Academy of Management Review Vol. 36, No. 1, 127–150, diakses dari https://is.vsfs.cz/el/6410/zima2012/NA_HRM/

um/3904027/2011_Ployhart_Moliterno_EmergenceofHumanCapital_Multileve
lModel127.full_1_.pdf

- Pratiwi, R. dan Roekhudin, 2016. Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN 2015 (Studi pada Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. 4 No.2
- Putra, C. K., Pratiwi R. N. dan Suwondo, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212, diakses dari <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/193/173>
- Sanusi, A., 2016. Penyerapan Dana Desa Belum Maksimal, *Koran Sindo* 18 Oktober, diakses dari <http://www.koransindo.com/news.php?r=0&n=27&date=2016-10-18>
- Sanusi, Paranoan dan Djumlani, 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, *eJournal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 3. Hal. 1732-1745, diakses dari [http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/jurnal%20akhir%20\(08-27-14-03-11-36\).pdf](http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/jurnal%20akhir%20(08-27-14-03-11-36).pdf)
- Subroto, A., 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008), Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, diakses dari http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf
- Tuerah, N., 2015. Kabupaten kota di Sulut tak Maksimal Serap Dana Desa, *Tribun Manado* 28 September, diakses dari <http://manado.tribunnews.com/2015/09/28/kabupaten-kota-di-sulut-tak-maksimal-serap-dana-desa>